

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Metode Penulisan	10
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	10
1.4.2. Sumber Bahan Hukum	11
1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	11
1.5. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH DIREKTORAT	
JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK PEMBANGUNAN	
RUMAH DINAS.....	14

2.1. Pembebasan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Instansi Pemerintah	14
2.2. Perolehan Hak Pakai dan Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Agraria di Indonesia	23
2.2.1. Hak Pakai Menurut UUPA 1960, dan PP No. 40 Tahun 1996.....	23
2.2.2. Perolehan Hak Pakai Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 (PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999)	35
2.2.3. Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut UUPA 1960 , PP No. 10 Tahun 1961, dan PP No. 24 Tahun 1997	39
2.3. Praktek Perolehan Hak Pakai Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .	49
BAB III. KEDUDUKAN HUKUM TANAH OBYEK SENGKETA.....	54
3.1. Sengketa yang Timbul Sebagai Akibat Dari Kelalaian Dalam Proses Permohonan Hak Pakai Atas Tanah	54
3.2. Analisis Subyek Hukum yang Berhak Atas Tanah Obyek Sengketa.....	59
BAB IV. PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR BACAAN.....	xiv
LAMPIRAN.....	xvi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573).
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).
6. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

